PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 100.3.2/Kep. 21 -DPRD/2025
LAMPIRAN : 2 (DUA) BERKAS

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib perencanaan pembentukan Peraturan Daerah, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat daftar Raperda prioritas dan Raperda kumulatif terbuka;

c. bahwa terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 namun belum selesai dibahas dan belum ditetapkan, sehingga perlu dicantumkan kembali dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 sebagai Rancangan Peraturan Daerah lanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Cirebon Nomor 100.3.2/37/SETDA tanggal 11 Desember 2025 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

2. Laporan Bapemperda tentang Hasil Penyusunan Propemperda Tahun 2026 bersama Pemerintah Daerah tanggal 19-20 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 terdiri dari 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah, terdiri dari:

1. 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah Prioritas Tahun 2026; dan
2. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka Tahun 2026

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Prioritas Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 1 sebanyak 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari:

1. 5 (lima) Raperda prakarsa DPRD; dan
2. 8 (sembilan) Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah yang termasuk dalam kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 dapat diajukan dan dibahas di luar daftar prioritas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SOPHI ZULFIA

Tembusan:
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
NOMOR: 100.3.2/Kep. 21 -DPRD/2025
TENTANG 29 Desember 2025
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
1.	Peraturan Daerah	Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro; 2. Fasilitasi pembiayaan, kemitraan, dan peningkatan kapasitas usaha; 3. Perlindungan usaha mikro dan peran Pemerintah Daerah.	√		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana	√		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Triwulan I	Prakarsa DPRD (Raperda lanjutan Tahun 2025)

						telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.					
2.	Peraturan Daerah	Administrasi Kependudukan	1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan; 2. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 3. Pemanfaatan data kependudukan dan perlindungan data pribadi.	√		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√		Dinas Kependuduk-an dan Pencatatan Sipil	Triwulan I	Inisiatif Pemerintah Daerah (Raperda lanjutan Tahun 2025)

						sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.					
3.	Peraturan Daerah	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	1. Perlindungan usaha nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam; 2. Pemberdayaan melalui pembiayaan, asuransi, dan sarana prasarana; 3. Peran Pemerintah Daerah dan kemitraan usaha.	√		1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun	√		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Triwulan I	Prakarsa DPRD (Raperda lanjutan Tahun 2025)

						2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.					
4.	Peraturan Daerah	Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi Partisipatif	1. Mekanisme pengumpulan data berbasis partisipasi masyarakat; 2. Metode pendataan (sensus, pemetaan sosial, verifikasi lapangan); 3. Pemanfaatan teknologi informasi dan geospasial; 4. Penetapan standar operasional pendataan.	√		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan	√		Dinas Komunikasi dan Informatika	Triwulan I	Prakarsa DPRD (Raperda lanjutan Tahun 2025)

						Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.					
5.	Peraturan Daerah	Pembentukan Produk Hukum Daerah	1. Asas, definisi; dan klasifikasi produk hukum daerah 2. Perencanaan (Propemperda, Propemperkada, dan Peraturan DPRD); 3. Penyusunan dan teknik penyusunan; 4. Pengharmonisasi-an; 5. Pembahasan; 6. Fasilitasi dan evaluasi Gubernur/Menteri sebelum penetapan; 7. Nomor register; 8. Pengundangan dan penyebarluasan.	√		1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan	√		Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Triwulan I	Inisiatif Pemerintah Daerah

						Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.					
6.	Peraturan Daerah	Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	1. Perencanaan infrastruktur pasif telekomunikasi; 2. Penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi; 3. Pemanfaatan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi; 4. Perizinan dan persetujuan teknis;	√		1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang;	√		Dinas Komunikasi dan Informatika	Triwulan I	Inisiatif Pemerintah Daerah

			5. Pembangunan, operasional dan pemeliharaan; 6. Pengendalian, pengawasan dan penertiban; 7. Pembinaan dan koordinasi; 8. Pembiayaan; 9. Penyelesaian sengketa.			2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.					
7.	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Barang milik daerah yang sah; 2. Kewenangan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah; 3. Besaran dan jangka waktu sewa dan pinjam pakai; 4. Kerja sama pemanfaatan; 5. Bangun guna serah/bisnis serah guna; 6. Dokumen bukti kepemilikan; 7. Pengamanan fisik; 8. Penilaian barang;		√	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		√	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Triwulan II	Inisiatif Pemerintah Daerah

			9. Pemindahtanganan dan penjualan barang milik daerah; 10. Nilai barang pengganti; 11. Hibah barang milik daerah; 12. Penyertaan modal; 13. Penghapusan barang milik daerah; 14. Indikator kinerja.			sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.					
8.	Peraturan Daerah	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Perubahan tipe kelembagaan Perangkat Daerah		√	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang		√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Triwulan II	Inisiatif Pemerintah Daerah

						Cipta Kerja manjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.					
9.	Peraturan Daerah	Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	1. Kedudukan, tugas dan kewenangan desa; 2. Pemerintah desa; 3. Badan permusyawaratan desa; 4. Hak, kewajiban dan larangan badan permusyawaratan desa; 5. Hubungan kerja pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa; 6. Musyawarah desa; 7. Peraturan desa; 8. Keuangan dan aset desa; 9. Pembinaan dan pengawasan; 10. Kerja sama desa;	√		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang	√		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Triwulan III	Inisiatif Pemerintah Daerah

			11. Partisipasi masyarakat desa; 12. Penyelesaian sengketa desa.			Cipta Kerja manjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.					
10.	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah	1. Tata cara (perencanaan, pelaksanaan, pertanggung-jawaban); 2. Sumber dana; 3. Bentuk modal (uang/barang); 4. Pelaporan; 5. Pembinaan dan pengawasan.	√		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017	√		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Triwulan III	Inisiatif Pemerintah Daerah

						tentang Badan Usaha Milik Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.					
11.	Peraturan Daerah	Penggabungan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar	1. Penggabungan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat; 2. Perubahan badan hukum; 3. Nomenklatur dan nama badan hukum baru; 4. Susunan organisasi dan tata kelola; 5. Modal dan saham; 6. Kegiatan usaha; 7. Pembinaan dan pengawasan.	√		1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.	√		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Triwulan III	Inisiatif Pemerintah Daerah

12.	Peraturan Daerah	Cagar Budaya	1. Pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya daerah; 2. Penetapan objek cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan peran Pemerintah Daerah; 3. Partisipasi masyarakat dan pendanaan pelestarian cagar budaya.	√		1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.	√		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Triwulan IV	Prakarsa DPRD
13.	Peraturan Daerah	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	1. Bentuk dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi; 2. Jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; 3. Tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; 4. Jangka waktu dan frekuaensi	√		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	√		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan IV	Prakarsa DPRD

			pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; 5. Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan; 6. Pembiayaan.			Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.					

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SOPHI ZULFIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
NOMOR: 100.3.2/Kep. 21 -DPRD/2025
TENTANG 29 Desember 2025
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2026

NO.	JENIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SOPHI ZULFIA